

Rancang Bangun Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan Kesejahteraan Masyarakat pada Biro Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara

Parhan Hidayat¹, Raissa Amanda Putri²

^{1,2}Sistem Informasi, Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Email: parhanhidayat.aan@gmail.com¹, raissa.ap@uinsu.ac.id²

Abstrak

Pelaporan kegiatan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian penting dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Biro Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab dalam mengoordinasikan serta melaporkan berbagai program sosial dan kemasyarakatan. Namun, proses pelaporan yang masih dilakukan secara manual dan terpisah menyebabkan rendahnya efisiensi kerja, potensi inkonsistensi data, serta keterlambatan penyediaan informasi bagi pimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi pelaporan kegiatan kesejahteraan masyarakat yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed methods dengan pendekatan kualitatif untuk analisis kebutuhan pengguna serta metode waterfall sebagai model pengembangan sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dirancang mampu meningkatkan efektivitas pelaporan, memperbaiki kualitas dan konsistensi data, serta mendukung pengambilan keputusan manajerial secara lebih cepat dan akurat.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Pelaporan Kegiatan, Kesejahteraan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Program-program kesejahteraan masyarakat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan sosial masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut harus didukung oleh sistem pelaporan yang mampu menyajikan informasi secara akurat, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban publik (Mardiasmo, 2021, hlm. 45–47; Sari & Kurniawan, 2023).

Biro Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki peran penting dalam menghimpun, mengoordinasikan, serta melaporkan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan mitra terkait. Pelaporan kegiatan menjadi dasar bagi pimpinan daerah dalam melakukan evaluasi kinerja, perumusan kebijakan lanjutan, serta pengambilan keputusan strategis. Namun, kompleksitas kegiatan dan banyaknya pihak yang terlibat menuntut adanya sistem pengelolaan informasi yang terintegrasi dan andal agar data yang dihasilkan dapat digunakan secara optimal (Heeks, 2021).

Kondisi faktual menunjukkan bahwa proses pelaporan kegiatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan Biro Kesejahteraan Masyarakat masih didominasi oleh mekanisme manual dan terfragmentasi. Data kegiatan dicatat dalam dokumen terpisah, baik dalam bentuk laporan fisik maupun file digital yang tidak terintegrasi dalam satu basis data. Situasi ini menyebabkan proses rekapitulasi dan penyusunan laporan memerlukan waktu yang relatif lama, berpotensi menimbulkan inkonsistensi data, serta menyulitkan proses monitoring dan evaluasi kegiatan secara menyeluruh. Permasalahan serupa juga ditemukan pada berbagai instansi pemerintah daerah lain yang belum menerapkan sistem informasi pelaporan secara terstruktur (Putra & Pratama, 2021).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penerapan sistem informasi di sektor publik menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Sistem informasi dipahami sebagai sekumpulan komponen yang saling terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi (Laudon & Laudon,

2021, hlm. 62–64). Dalam konteks pemerintahan daerah, sistem informasi pelaporan berfungsi sebagai sarana penguatan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mendukung penerapan prinsip good governance berbasis data (Stair & Reynolds, 2021).

Landasan teori pengembangan sistem informasi menekankan pentingnya kesesuaian antara sistem yang dibangun dengan kebutuhan pengguna dan proses bisnis organisasi. Pengembangan sistem yang tidak didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif berpotensi menghasilkan sistem yang tidak digunakan secara optimal. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif diperlukan untuk memahami secara mendalam alur kerja pelaporan, permasalahan yang dihadapi pengguna, serta ekspektasi terhadap sistem yang akan dikembangkan (Creswell & Plano Clark, 2021, hlm. 8–10; Sugiyono, 2021, hlm. 114–118).

Selain itu, pemilihan model pengembangan sistem juga menjadi faktor penting dalam menjamin kualitas sistem informasi. Metode waterfall masih banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi pemerintahan karena memiliki tahapan yang sistematis, terdokumentasi dengan baik, dan mudah dikendalikan, sehingga sesuai dengan karakteristik organisasi sektor publik yang menuntut kepastian proses dan kejelasan output (Pressman & Maxim, 2020, hlm. 39–41; Sommerville, 2020, hlm. 28–30).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pelaporan berbasis web mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan kualitas informasi di instansi pemerintah. Putra dan Pratama (2021) menemukan bahwa sistem pelaporan kegiatan berbasis web dapat mempercepat proses penyusunan laporan dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Sementara itu, Sari dan Kurniawan (2023) menegaskan bahwa digitalisasi pelaporan berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji konteks pelaporan kegiatan kesejahteraan masyarakat pada biro kesejahteraan di tingkat provinsi.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pelaporan kegiatan kesejahteraan masyarakat yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan Biro Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan sistem informasi yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan, memperbaiki kualitas serta konsistensi data, dan mendukung pengambilan keputusan manajerial secara lebih cepat dan akurat.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada perancangan dan pengembangan sistem informasi pelaporan kegiatan kesejahteraan masyarakat, tanpa membahas integrasi dengan sistem penganggaran atau sistem keuangan daerah secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan tata kelola pelaporan kegiatan kesejahteraan masyarakat serta kontribusi akademik dalam pengembangan sistem informasi sektor publik.

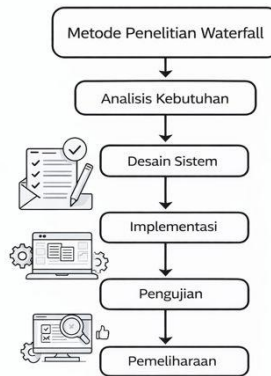
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, yaitu penggabungan metode kualitatif dan metode pengembangan sistem informasi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berorientasi pada pengembangan sistem sebagai artefak teknologi, tetapi juga menuntut pemahaman mendalam terhadap proses bisnis, kebutuhan pengguna, serta permasalahan pelaporan yang dihadapi organisasi (Creswell & Plano Clark, 2021, hlm. 8–10).

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan pengguna sistem. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pegawai Biro Kesejahteraan Masyarakat yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai alur kerja, kendala operasional, serta ekspektasi terhadap sistem yang akan dikembangkan. Selain itu, observasi langsung dilakukan untuk memahami proses pelaporan yang berjalan, serta studi dokumentasi terhadap laporan kegiatan dan regulasi terkait pelaporan kinerja pemerintah daerah (Sugiyono, 2021, hlm. 114–118).

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode waterfall. Metode ini dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis dan terstruktur, sehingga sesuai untuk pengembangan sistem informasi pemerintahan yang menuntut dokumentasi dan pengendalian proses yang ketat (Pressman & Maxim, 2020, hlm. 39–41). Tahapan waterfall meliputi analisis

kebutuhan sistem, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap tahapan dilaksanakan secara berurutan untuk memastikan kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna serta meminimalkan risiko kesalahan pada tahap selanjutnya (Sommerville, 2020, hlm. 28–30)



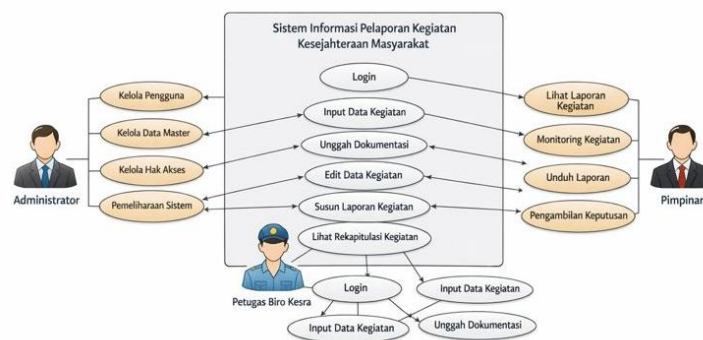
Gambar 1. Tahapan Metode *Waterfall*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaporan kegiatan kesejahteraan masyarakat di Biro Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebelum pengembangan sistem informasi masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi antar unit kerja. Setiap kegiatan dicatat dalam dokumen terpisah yang disimpan dalam bentuk arsip fisik maupun file digital sederhana. Kondisi ini menyebabkan proses pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan laporan memerlukan waktu yang relatif lama serta bergantung pada ketelitian individu petugas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Heeks (2021) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan manual di sektor publik cenderung menimbulkan inefisiensi operasional dan meningkatkan risiko kesalahan data.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, sistem informasi pelaporan dirancang untuk mengakomodasi seluruh alur kerja pelaporan kegiatan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pencatatan data kegiatan, dokumentasi pelaksanaan, hingga penyusunan laporan secara otomatis. Sistem dikembangkan berbasis web dengan basis data terpusat, sehingga memungkinkan setiap data kegiatan tersimpan secara konsisten dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Penerapan basis data terpusat bertujuan mengurangi redundansi data serta meningkatkan integritas dan keandalan informasi, sebagaimana direkomendasikan dalam pengembangan sistem informasi manajemen modern (Laudon & Laudon, 2021, hlm. 210–212; Stair & Reynolds, 2021).

Use Case Diagram



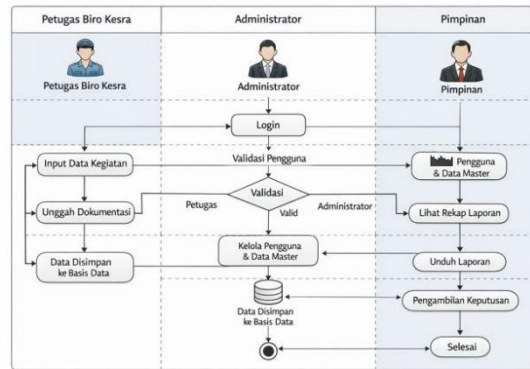
Gambar 2. Use Case Diagram Sistem Informasi Kegiatan Kesejahteraan Masyarakat

Use case diagram digunakan untuk memodelkan kebutuhan fungsional sistem informasi dari sudut pandang pengguna dengan menekankan hubungan antara aktor dan layanan yang disediakan oleh sistem. Dalam Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan Kesejahteraan Masyarakat, use case diagram menggambarkan tiga aktor utama, yaitu Administrator, Pegawai, dan Pimpinan, yang masing-masing memiliki peran dan hak akses berbeda. Administrator bertanggung jawab terhadap pengelolaan

pengguna dan validasi sistem, Pegawai melakukan input serta pengelolaan data kegiatan, sedangkan Pimpinan memanfaatkan laporan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa sistem dirancang sesuai kebutuhan organisasi dan mendukung prinsip akuntabilitas serta transparansi pelaporan pemerintahan daerah (Sommerville, 2020; Pressman & Maxim, 2020).

Secara konseptual, use case diagram juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pengembang sistem dan pemangku kepentingan non-teknis. Dengan visualisasi yang sederhana namun komprehensif, diagram ini meminimalkan kesalahpahaman dalam tahap analisis kebutuhan dan menjadi acuan penting pada fase perancangan sistem berbasis model waterfall (Rosa & Shalahuddin, 2021).

Activity Diagram

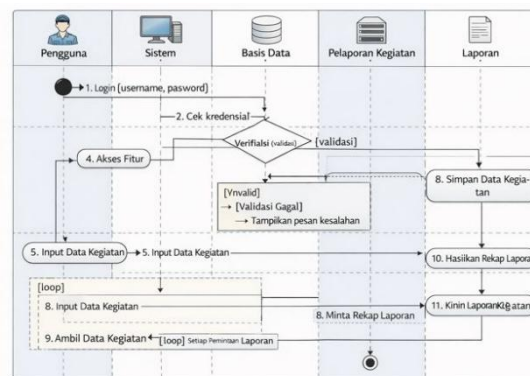


Gambar 3. Activity Diagram Sistem Informasi Kegiatan Kesejahteraan Masyarakat

Pada sistem pelaporan kegiatan kesejahteraan masyarakat, activity diagram menunjukkan rangkaian aktivitas seperti login pengguna, input data kegiatan, proses validasi, pengolahan data, hingga penyajian laporan kepada pimpinan. Diagram ini menekankan aliran kerja (workflow) yang sistematis dan memperlihatkan titik keputusan (decision points) yang mempengaruhi jalannya proses selanjutnya. Dengan demikian, activity diagram membantu mengidentifikasi potensi bottleneck serta meningkatkan efisiensi proses pelaporan (Dennis et al., 2021).

Selain itu, activity diagram mendukung analisis proses bisnis berbasis kebutuhan organisasi publik yang menuntut ketepatan prosedur dan konsistensi data. Representasi visual ini memudahkan peneliti dan pengembang dalam mengevaluasi kesesuaian proses sistem dengan standar operasional birokrasi, sekaligus memastikan integrasi antarproses berjalan secara logis dan terkontrol (Widodo & Herlawati, 2022).

Sequence Diagram

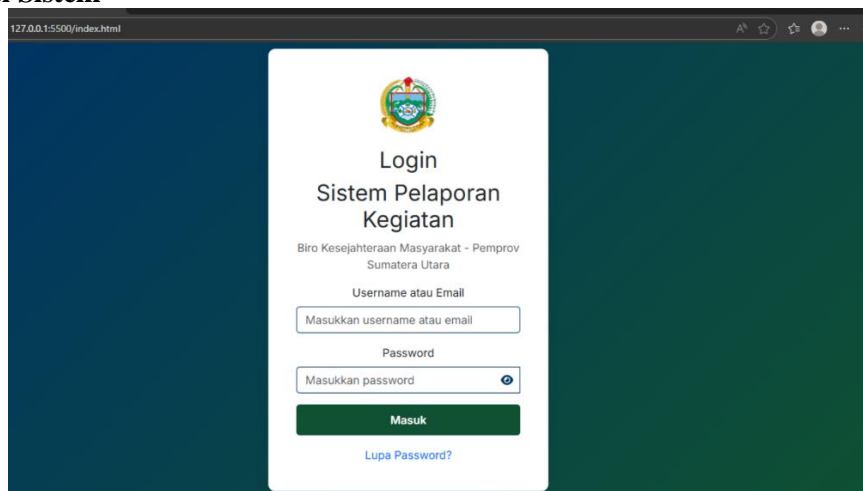


Gambar 4. Sequence Diagram Sistem Informasi Kegiatan Kesejahteraan Masyarakat

Sequence diagram digunakan untuk memodelkan interaksi dinamis antara aktor dan komponen sistem berdasarkan urutan waktu. Dalam sistem ini, sequence diagram menggambarkan bagaimana pesan atau perintah dikirimkan oleh pengguna (misalnya Pegawai atau Pimpinan) ke sistem, diproses oleh modul terkait, dan kemudian menghasilkan respons berupa tampilan halaman atau laporan. Contoh interaksi yang dimodelkan meliputi proses autentikasi login, penginputan kegiatan, serta penarikan data laporan. Diagram ini memberikan gambaran rinci mengenai mekanisme komunikasi internal sistem dan alur eksekusi proses secara teknis (Pressman & Maxim, 2020).

Lebih lanjut, sequence diagram berperan penting dalam menjamin konsistensi antara desain konseptual dan implementasi sistem. Dengan memvisualisasikan urutan pesan secara kronologis, diagram ini membantu mengurangi kesalahan logika pemrograman serta meningkatkan kualitas sistem informasi yang dikembangkan, khususnya dalam konteks sistem pemerintahan yang menuntut keandalan dan ketepatan informasi (Satzinger et al., 2021).

Implementasi Sistem



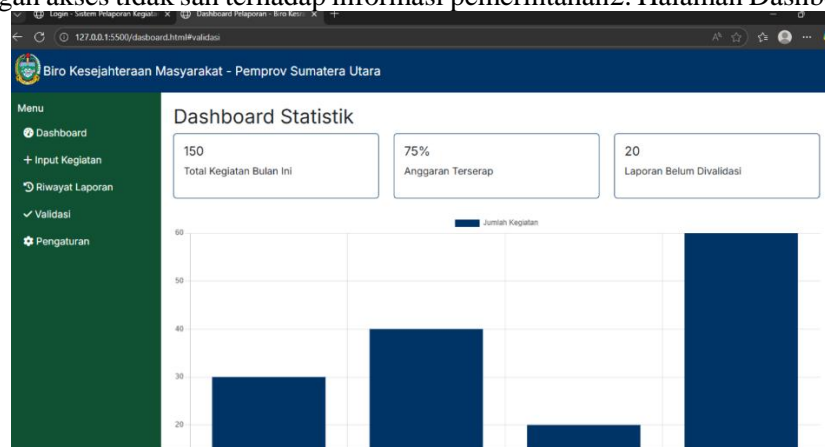
Gambar 5. Tampilan Halaman Login

1. Halaman Login

Fungsi Utama: Halaman login berfungsi sebagai gerbang autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Pengguna diwajibkan memasukkan username dan password yang telah terdaftar.

Manfaat:

- a. Menjamin keamanan data pelaporan kegiatan
- b. Mengatur hak akses berbasis peran (Administrator, Pegawai, Pimpinan)
- c. Mencegah akses tidak sah terhadap informasi pemerintahan.



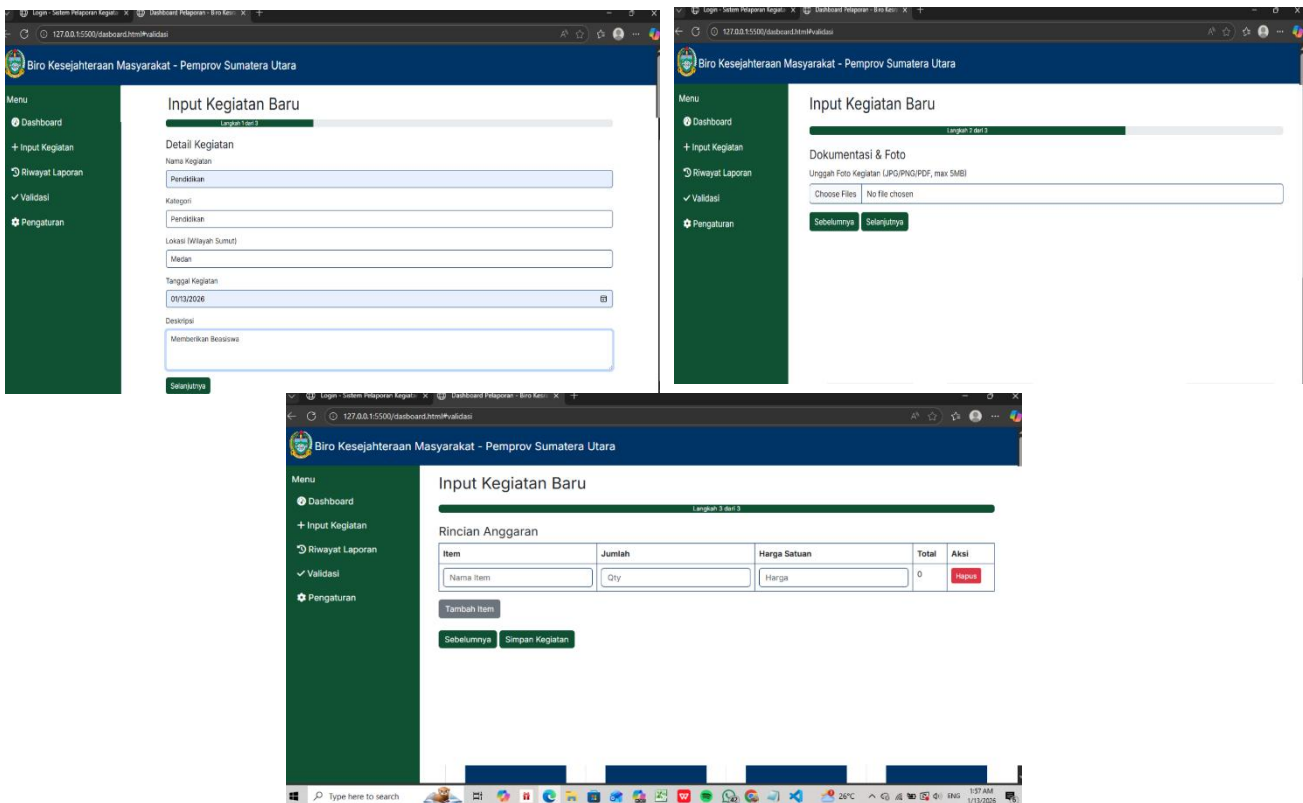
Gambar 6. Tampilan Halaman Dashboard

2. Halaman Dashboard

Pada tampilan Dashboard Statistik, pengguna langsung disajikan informasi ringkas dan strategis berupa total kegiatan bulan berjalan, Persentase anggaran yang telah terserap, Jumlah laporan yang belum divalidasi. Ketiga indikator ini ditampilkan dalam bentuk summary card sehingga memudahkan pimpinan maupun administrator dalam memantau kondisi pelaksanaan kegiatan secara cepat. Selain itu, grafik batang “Jumlah Kegiatan” berfungsi sebagai visualisasi tren aktivitas, yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making).

Fungsi utama dashboard:

- a. Monitoring kinerja kegiatan secara real-time
- b. Evaluasi capaian program
- c. Deteksi dini terhadap keterlambatan laporan atau validasi



Gambar 7. Tampilan Halaman Input Kegiatan

3. Halaman Input Kegiatan Baru (Langkah 1: Detail Kegiatan)

Halaman ini merupakan tahap awal proses input kegiatan, yang menampilkan form terstruktur berisi nama kegiatan, kategori kegiatan, lokasi pelaksanaan (wilayah Sumatera Utara), Tanggal kegiatan, Deskripsi kegiatan. Penggunaan step progress bar (“Langkah 1 dari 3”) menunjukkan bahwa sistem menerapkan alur input bertahap (wizard form). Pendekatan ini bertujuan mengurangi kesalahan input data dan meningkatkan konsistensi informasi yang dilaporkan oleh pegawai.

4. Halaman Input Kegiatan Baru (Langkah 2: Dokumentasi & Foto)

Pada tahap kedua, pengguna diarahkan untuk mengunggah dokumen pendukung kegiatan, seperti foto atau berkas laporan. Sistem membatasi format file (JPG/PNG/PDF) dan ukuran maksimum, yang menunjukkan adanya perhatian terhadap:

- a. Standarisasi dokumen
- b. Keamanan data
- c. Efisiensi penyimpanan

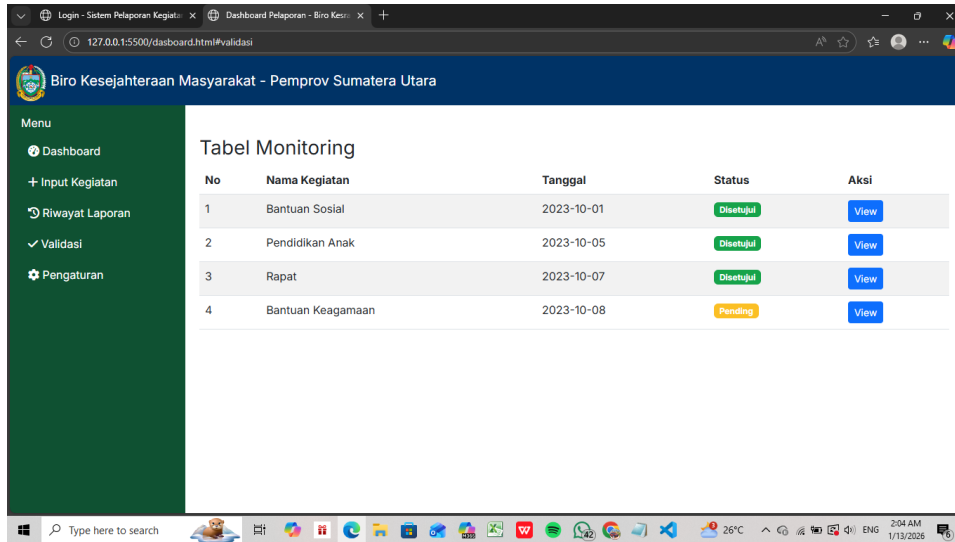
Fitur ini penting dalam konteks akuntabilitas publik, karena dokumentasi visual menjadi bukti sah pelaksanaan kegiatan.

5. Halaman Input Kegiatan Baru (Langkah 3: Rincian Anggaran)

Tahap terakhir berfokus pada pengelolaan rincian anggaran kegiatan, meliputi:

- a. Nama item anggaran
- b. Jumlah (kuantitas)
- c. Harga satuan
- d. Total biaya per item

Fitur “Tambah Item” dan perhitungan total secara dinamis mencerminkan desain sistem yang mendukung transparansi dan akurasi pelaporan keuangan. Tombol “Simpan Kegiatan” menandai akhir proses input dan mengirim data ke sistem untuk selanjutnya diproses dan divalidasi.



Gambar 8. Tampilan Halaman Tabel Monitoring

6. Halaman Tabel Monitoring / Riwayat Laporan

Halaman ini menampilkan daftar kegiatan yang telah dilaporkan, disusun dalam bentuk tabel dengan atribut:

- a. Nama kegiatan
- b. Tanggal pelaksanaan
- c. Status laporan (Disetujui / Pending)
- d. Aksi (View)

Pewarnaan status (hijau untuk disetujui, kuning untuk pending) membantu pengguna mengenali kondisi laporan secara visual. Halaman ini berfungsi sebagai media monitoring dan evaluasi, khususnya bagi administrator dan pimpinan.

Implementasi sistem menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam efektivitas proses pelaporan. Data kegiatan yang sebelumnya harus direkap secara manual kini dapat diolah secara otomatis oleh sistem, sehingga waktu penyusunan laporan menjadi lebih singkat dan kesalahan pencatatan dapat diminimalkan. Hal ini memperkuat temuan O'Brien dan Marakas (2022) yang menyatakan bahwa sistem informasi pelaporan berbasis komputer mampu meningkatkan efisiensi administrasi serta kualitas informasi yang dihasilkan oleh organisasi. Selain itu, sistem juga memungkinkan pelacakan data kegiatan secara historis, sehingga memudahkan proses evaluasi kinerja dari waktu ke waktu.

Hasil Pengujian (Blackbox Testing)

Pengujian black box dilakukan untuk memastikan setiap fungsi utama sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna tanpa memperhatikan struktur kode program. Pengujian difokuskan pada validitas input, alur proses, serta keluaran yang dihasilkan sistem.

Tabel 1. Blackbox Testing

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Halaman Login	Pengguna memasukkan username dan password valid	Username & password terdaftar	Sistem menampilkan halaman dashboard	Dashboard berhasil ditampilkan	Valid
2	Halaman Login	Pengguna memasukkan username atau password tidak valid	Data login salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan	Pesan error muncul	Valid
3	Dashboard Statistik	Sistem menampilkan ringkasan data kegiatan	Data kegiatan tersedia	Total kegiatan, anggaran, dan status laporan tampil	Informasi tampil sesuai data	Valid
4	Input Kegiatan (Langkah 1)	Pengguna mengisi seluruh field detail kegiatan	Nama, kategori, lokasi, tanggal, deskripsi	Sistem menyimpan data sementara dan lanjut ke langkah 2	Berpindah ke langkah 2	Valid
5	Input Kegiatan (Langkah 1)	Pengguna tidak mengisi field wajib	Field kosong	Sistem menampilkan peringatan validasi	Pesan validasi tampil	Valid
6	Upload Dokumentasi (Langkah 2)	Pengguna mengunggah file sesuai format	JPG/PNG/PDF ≤ 5MB	File berhasil diunggah	File tersimpan	Valid
7	Upload Dokumentasi (Langkah 2)	Pengguna mengunggah file tidak sesuai format	File EXE/ukuran >5MB	Sistem menolak unggahan	Unggahan ditolak	Valid
8	Input Anggaran (Langkah 3)	Pengguna menambahkan item anggaran	Nama item, qty, harga	Total biaya dihitung otomatis	Total terhitung dengan benar	Valid
9	Input Anggaran (Langkah 3)	Pengguna menghapus item anggaran	Klik tombol hapus	Item dihapus dari tabel	Item berhasil dihapus	Valid
10	Simpan Kegiatan	Pengguna menyimpan data kegiatan lengkap	Data kegiatan lengkap	Sistem menyimpan data dan menampilkan notifikasi berhasil	Data tersimpan	Valid
11	Tabel Monitoring	Sistem menampilkan daftar kegiatan	Data laporan tersedia	Tabel menampilkan nama, tanggal, status	Data tampil lengkap	Valid
12	Status Laporan	Sistem menampilkan status validasi	Status disetujui/pending	Status ditampilkan dengan label warna	Status sesuai	Valid

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
13	Validasi Laporan	Administrator menyetujui laporan validasi	Klik tombol validasi	Status berubah menjadi disetujui	Status berhasil diperbarui	Valid
14	Aksi View Laporan	Pengguna melihat detail laporan	Klik tombol view	Sistem menampilkan detail kegiatan	Detail tampil	Valid
15	Navigasi Menu	Pengguna memilih menu sidebar	Klik menu	Sistem menampilkan halaman sesuai menu	Navigasi berjalan	Valid

Berdasarkan hasil pengujian black box yang dilakukan, seluruh fungsi utama pada sistem pelaporan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Sistem mampu menangani input data, validasi pengguna, pengelolaan dokumentasi, serta monitoring dan validasi laporan dengan baik. Tidak ditemukan kesalahan fungsional yang menghambat proses bisnis utama, sehingga sistem dinyatakan layak secara fungsional untuk digunakan pada tahap implementasi selanjutnya.

Dari sisi kualitas data, sistem informasi yang dirancang mampu meningkatkan konsistensi dan akurasi informasi pelaporan. Setiap data kegiatan harus diinput sesuai format yang telah ditentukan, sehingga mengurangi variasi pencatatan yang sebelumnya sering terjadi akibat perbedaan pemahaman antar petugas. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Romney dan Steinbart (2021, hlm. 94–96) yang menegaskan bahwa standarisasi input data merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi dan pelaporan. Dengan data yang lebih konsisten, pimpinan organisasi dapat memperoleh gambaran kinerja kegiatan kesejahteraan masyarakat secara lebih objektif.

Dari perspektif manajerial, keberadaan sistem informasi pelaporan memberikan nilai tambah dalam mendukung pengambilan keputusan. Informasi kegiatan yang tersaji secara real-time dan terstruktur memungkinkan pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara lebih cepat serta berbasis data. Hal ini memperkuat prinsip evidence-based decision making dalam tata kelola pemerintahan daerah (Sari & Kurniawan, 2023). Sistem informasi tidak lagi berfungsi sekadar sebagai alat administrasi, tetapi menjadi instrumen strategis dalam pengendalian dan perencanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan temuan Putra dan Pratama (2021) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan kegiatan berbasis web mampu meningkatkan efisiensi kerja instansi pemerintah. Namun, penelitian ini memiliki kekhasan pada konteks pelaporan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat biro provinsi, yang memiliki karakteristik koordinasi lintas sektor dan kompleksitas data yang lebih tinggi. Dengan demikian, sistem yang dirancang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pelaporan kegiatan kesejahteraan masyarakat memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional, kualitas data, serta efektivitas pengambilan keputusan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa digitalisasi sistem pelaporan merupakan langkah strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas sektor publik, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian e-government dan sistem informasi pemerintahan modern (Heeks, 2021; Laudon & Laudon, 2021; Sari & Kurniawan, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam pelaporan kegiatan kesejahteraan masyarakat di Biro Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara terletak pada belum terintegrasinya proses pengelolaan data kegiatan. Mekanisme pelaporan yang masih bersifat manual dan terfragmentasi terbukti berdampak pada rendahnya efisiensi kerja, meningkatnya potensi inkonsistensi data, serta keterlambatan penyediaan

informasi bagi pimpinan daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan tata kelola pemerintahan berbasis data dengan praktik administrasi yang masih konvensional.

Rancang bangun sistem informasi pelaporan kegiatan kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan dalam penelitian ini mampu menjawab permasalahan tersebut dengan menyediakan sistem yang terintegrasi, berbasis web, dan didukung oleh basis data terpusat. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan kegiatan, tetapi juga sebagai instrumen pengelolaan informasi yang mendukung proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara sistematis. Hasil implementasi menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaporan, serta perbaikan kualitas dan konsistensi data kegiatan yang dihasilkan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran dapat diajukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini. Disarankan agar sistem informasi pelaporan yang telah dirancang dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikannya ke dalam ekosistem sistem informasi pemerintah daerah, khususnya sistem perencanaan dan penganggaran. Integrasi ini penting untuk memastikan kesinambungan data antar proses serta memperkuat fungsi sistem sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2021). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed., hlm. 8–15). Sage Publications.
- Dennis, A., Wixom, B. H., & Tegarden, D. (2021). *Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML* (6th ed.). Hoboken: Wiley.
- Heeks, R. (2021). Digital government and public sector reform. *Information Polity*, 26(1), 1–12. <https://doi.org/10.3233/IP-200267>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2021). *Management information systems: Managing the digital firm* (16th ed., hlm. 62–64, 210–212). Pearson.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik* (ed. revisi, hlm. 45–47). Andi.
- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2022). *Management information systems* (11th ed.). McGraw-Hill.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed., hlm. 39–41). McGraw-Hill.
- Putra, R. A., & Pratama, A. (2021). Sistem informasi pelaporan kegiatan berbasis web pada instansi pemerintah. *Jurnal Sistem Informasi*, 17(2), 85–95. <https://doi.org/10.21609/jsi.v17i2.1105>
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2021). *Accounting information systems* (14th ed., hlm. 94–96). Pearson
- Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2021). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.
- Sari, D. P., & Kurniawan, T. (2023). E-government and transparency in local government. *Government Information Quarterly*, 40(1), 101720. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101720>
- Satzinger, J. W., Jackson, R. B., & Burd, S. D. (2021). *Systems Analysis and Design in a Changing World* (8th ed.). Boston: Cengage Learning
- Stair, R., & Reynolds, G. (2021). *Principles of information systems* (14th ed.). Cengage Learning.
- Sommerville, I. (2020). *Software engineering* (10th ed., hlm. 28–30). Pearson.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (hlm. 114–118). Alfabeta.
- Widodo, P. P., & Herlawati. (2022). *Menggunakan UML: UML Secara Luas Digunakan untuk Pemodelan Sistem*. Bandung: Informatika.